



KEBIJAKAN KEAMANAN ENERGI TIONGKOK DI AFRIKA PADA PERIODE XI JINPING (2013-2019)

Nur Ulfa Rosinawati¹, Fahlesa Munabari²

¹Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Budi Luhur; Indonesia: ulfa535@gmail.com

²Program Studi Hubungan Internasional, President University; Indonesia: fahlesa.munabari@president.ac.id

Abstract

This article aims to analyze China's strategy to secure its oil needs in Africa under the regime of President Xi Jinping (2013-2019). China's rapid economic growth has prompted the country to formulate effective energy security as well as foreign policy measures in its African partner countries with a view to securing the sustainable supply of oil to meet China's domestic oil demands. Employing a qualitative and descriptive methods, this study examines the foreign policy measures of the regime of President Xi Jinping in order to secure the oil supply in Africa. This article shows that the Chinese government under President Xi Jinping reformed its foreign policy approaches towards Africa, providing its partner countries in the continent with significantly increased foreign aid and revising China-Africa's framework of cooperation in the Forum on China-Africa Cooperation (COFAC) so as to facilitate a better understanding, mutual respect, and comprehensive cooperation between China and Africa.

Keywords: Africa, China, energy, oil, foreign policy

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan kebutuhan minyaknya di Afrika di bawah pemerintahan Presiden Xi Jinping pada periode 2013-2019. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang cepat telah mendorong negara ini untuk merumuskan kebijakan keamanan energinya yang efektif serta langkah-langkah kebijakan luar negeri di negara-negara mitra Afrika dengan maksud untuk mengamankan pasokan minyaknya secara berkelanjutan guna memenuhi permintaan minyak domestiknya. Dengan menggunakan metode kualitatif dan deskriptif, penelitian ini mengkaji langkah-langkah kebijakan luar negeri pemerintah Presiden Xi Jinping untuk mengamankan pasokan minyak di Afrika. Artikel ini menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping mereformasi pendekatan kebijakan luar negerinya ke Afrika serta memberikan negara-negara mitranya di benua tersebut dengan peningkatan bantuan asing yang signifikan dan merevisi kerangka kerja sama Tiongkok-Afrika dalam Forum Kerjasama Cina-Afrika (COFAC) untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, saling menghormati, dan kerja sama yang komprehensif antara Tiongkok dan Afrika.

Kata Kunci: Afrika, energi, kebijakan luar negeri, minyak, Tiongkok.

Pendahuluan

Memasuki abad ke-21 ini Tiongkok tumbuh menjadi negara poros kekuatan baru yang diperhitungkan dalam skala regional maupun global. Hal ini ditandai dengan perkonomian Tiongkok mengalami pertumbuhan sebesar 9,48% dengan *Gross Domestic Product* (GDP) yang mencapai angka 18.232,1 milyar Yuan. bahkan menurut data Bank Dunia, pada tahun 2010, GDP Tiongkok telah melampaui GDP Jepang yang mencapai angka USD 5.927 milyar (Jiahua, 2006: 25) Pesatnya pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan jumlah energi minyak, terlebih lagi jumlah populasi Tiongkok yang besar menimbulkan masalah tersendiri bagi negara tersebut, yakni dalam hal kebutuhan pasokan energi minyak. Imbasnya, permintaan akan energi minyak pun semakin meningkat sebagai bahan bakar untuk industri, komersial, dan kebutuhan rumah tangga.

Pada masa pemerintahan Mao Zedong (1949 – 1976), Tiongkok memiliki banyak cadangan minyak yang berasal dari dalam negerinya. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan Mao Zedong, industri minyak di Tiongkok baru mulai dikembangkan oleh pemerintah Tiongkok. Selain itu, pemerintah bersama perusahaan minyak Tiongkok lainnya menemukan beberapa ladang minyak besar di beberapa wilayah Tiongkok seperti Daqing pada tahun 1959, Shengli pada tahun 1963, Dagang pada tahun 1964, dan Liaohe pada tahun 1969. Pada tahun 1978 menjelang reformasi, Tiongkok menjadi negara penghasil energi terbesar keempat di dunia, setelah Amerika Serikat, Arab Saudi, dan Uni Soviet. Tiongkok memiliki sumber energi beragam yang terdiri dari 75% batubara, 17,5% minyak, gas alam, dan tenaga air yang masing-masing mewakili 2% dan 5,5%. (Meidan, 2016: 5-6).

Kemajuan atas industri minyak Tiongkok pada periode pemerintahan Mao Zedong tersebut dianggap sangat mengesankan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok mampu menjadi negara penghasil energi pada masa pemerintahan Mao Zedong (Smil, 1978: 234). Bahkan, pada masa pemerintahan Mao Zedong, Tiongkok menjadi negara yang mandiri dalam sektor energi dan menjadi eksportir minyak dan batu bara dimana penjualan minyak dan batu bara tersebut menjadi salah satu sumber pemasukan utama bagi negara ini. Namun, Tiongkok juga menjadi konsumen energi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Eropa pada rentang tahun 1965 sampai tahun 1985 (Roser, 2015)

Adanya reformasi ekonomi pada masa pemerintahan Deng Xiaoping (1982-1987) berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang mengubah pola produksi dan konsumsi

energi domestik. Reformasi ekonomi yang lebih menekankan pada modernisasi sistem ekonomi dilakukan dengan memperkenalkan mekanisme pasar dan mendorong investasi asing dalam perekonomian Tiongkok. Hal tersebut pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Namun, Tiongkok mengalami kekurangan pasokan energi untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Zhao, 2001: 3).

Pada tahun 1980an produksi minyak Tiongkok mengalami penurunan drastis yang disebabkan karena harga minyak dunia yang mengalami penurunan. Meskipun permintaan akan minyak meningkat, namun para pemilik industri minyak mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana yang cukup untuk menstabilkan pengeluaran mereka guna keperluan eksplorasi dan pengembangan sumber-sumber minyak baru untuk memenuhi permintaan minyak dalam negeri. Kemudian pada tahun 1990an, produksi minyak di Tiongkok kembali mengalami stagnansi akibat penurunan harga minyak dunia yang dipicu oleh perang teluk I atau *Gulf War*. Hal ini berdampak terhadap berubahnya status Tiongkok yang sebelumnya sebagai negara pengekspor minyak, menjadi negara pengimpor minyak pada tahun 1993 (Nam, 2005: 3).

Terbatasnya pasokan minyak dalam negeri Tiongkok mengharuskan Tiongkok untuk mengimpor minyak dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya (Lee & Shalmon, 2008: 110). Salah satu wilayah yang dipilih Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan energi minyak dalam negerinya adalah Afrika. Pada prinsipnya, hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Afrika sudah dimulai sejak tahun 1950an (Hurst, 2006: 4). Bagi Tiongkok, Afrika tidak hanya penting dari segi ekonomi, politik, dan keamanan, namun juga dari segi ideologi. Hal ini disebabkan karena secara ekonomi Afrika merupakan penghasil sumber daya alam yang cukup besar sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok. Sementara itu dari segi politik, Tiongkok ingin mendapatkan dukungan politik dari Afrika mengenai kebijakan “One China” di dalam forum-forum multilateral (Sun, 2014: 1).

Hubungan kerjasama perdagangan energi antara Tiongkok dengan Afrika sudah berlangsung sejak tahun 1993 (Wenping, 2007: 24). Pada tahun 1996, Presiden Jiang Zemin melakukan kunjungan ke Afrika dengan mengedepankan lima prinsip yang menjadi dasar untuk memelihara hubungan politik dan kerjasama yang erat antara Tiongkok dengan Afrika. Lima prinsip bertujuan untuk; 1) membina hubungan Tiongkok dan Afrika dengan lebih baik, 2) memperlakukan satu sama lain sebagai negara yang sederajat yang didasarkan atas prinsip saling menghormati, 3) meningkatkan kerjasama pembangunan atas dasar prinsip saling menguntungkan, 4) meningkatkan

kerjasama dalam lingkup internasional, dan 5) memiliki visi masa depan dan menciptakan dunia yang lebih baik (FMPRC, 2013). Kemudian pada tahun 2005, Afrika menjadi eksportir utama minyak bagi Tiongkok (Hurst, 2006: 4). Bahkan, Tiongkok melakukan berbagai kunjungan kenegaraan ke beberapa negara di Afrika untuk mencari sumber minyak baru demi mengamankan keamanan energinya.

Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi besarnya permintaan energi dalam negeri Tiongkok. Selain karena pertumbuhan ekonominya yang pesat, tingginya permintaan energi di Tiongkok juga didorong oleh pertumbuhan populasi, urbanisasi, perkembangan sosial dan ekonomi, perkembangan teknologi, serta keterbatasan sumber daya alam dan upaya pelestarian lingkungan (Xiliang, 2005: 34) Strategi yang ditempuh Tiongkok untuk menjamin ketersediaan pasokan minyaknya di kawasan Afrika dapat dilihat melalui kebijakan-kebijakan luar negeri yang telah dibuat oleh pemerintahnya. Selain itu, terdapat perbedaan kebijakan luar negeri antara pemerintahan Presiden Xi Jinping dengan pemerintahan sebelumnya, yakni pemerintahan Presiden Hu Jintao. Pada pemerintahan Hu Jintao, kebijakan energi yang diciptakan lebih menekankan pada kebijakan pemenuhan energi Tiongkok dengan menggunakan minyak melalui ekspansi ke negara-negara penghasil minyak. Hal ini disebabkan karena pada masa pemerintahan Hu Jintao, Tiongkok bersikap lebih terbuka dalam hal hubungan ekonominya dengan negara lain (Wijayanti, 2017).

Perbedaan antara periode pemerintahan Presiden Xi Jinping dengan Presiden Hu Jintao terletak pada konsep "*Harmonious World*" yang sebelumnya digunakan oleh Hu Jintao. Konsep ini tidak lagi digunakan pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping. Xi Jinping menggantinya dengan konsep "*China Dream*" (Glaser, 2004: 1). Konsep "*Harmonious World*" bermakna bahwa Tiongkok ikut serta dalam mempromosikan perdamaian dunia dengan cara mengurangi konflik di dunia (Shijia, 2007). Sementara konsep "*China Dream*" dibagi menjadi empat tujuan, yakni: 1) *Strong China* (kuat secara ekonomi, politik, diplomasi, ilmu, dan militer), 2) *Civilized China* (persamaan dan keadilan, budaya yang kaya, dan moral yang tinggi), 3) *Harmonious China* (persahabatan diantara kelas sosial), dan *Beautiful China* (lingkungan yang sehat dan tingkat polusi yang rendah). Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Xi Jinping menggunakan konsep kekuatan diplomasi dengan karakteristik Tiongkok. Lebih jauh, diplomasi sebagai instrumen perwujudan kepentingan nasional dalam pentas internasional menjadi hal yang baru digunakan dalam sejarah pemerintahan Tiongkok (Kuhn, 2013). Xi Jinping juga berkomitmen untuk mengerahkan

perhatiannya guna mengubah Tiongkok menjadi negara adidaya global. Komitmen ini dijabarkan dalam visi “*China Dream*” yang diungkapkan Presiden Xi Jinping dalam pidatonya pada World Economic Forum di Davos pada bulan Januari 2017 (DW.Com, 2017).

Selain itu, pemerintahan Presiden Xi Jinping juga memperkenalkan kebijakan luar negerinya yang lebih pro-aktif. Hal ini berarti bahwa Tiongkok mulai memberikan prioritas lebih untuk memproyeksikan kebijakan luar negerinya di mata dunia internasional. Pada pemerintahan Presiden Xi Jinping, Tiongkok lebih cenderung menggunakan kekuatan ekonominya untuk mengukuhkan pengaruh Tiongkok terhadap negara-negara lain sekaligus juga untuk meningkatkan ketergantungan negara-negara tersebut terhadap Tiongkok. Dengan mengikat negara lain, Presiden Xi Jinping berkeinginan agar negara-negara lain dapat menghormati kepentingan Tiongkok (Glaser, 2004: 1). Untuk menjalankan kebijakan luar negeri dengan kekuatan ekonominya, pemerintahan Presiden Xi Jinping menjalankan diplomasinya melalui sektor perdagangan, investasi, dan memberikan bantuan asing dalam skala besar (Arase, 2015).

Jika melihat perbedaan konsep maupun kebijakan yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat perbedaan pemerintah Tiongkok dalam menjalankan kebijakan luar negerinya di kawasan Afrika pada era Presiden Xi Jinping. Di awal pemerintahannya pada bulan Maret 2013, presiden Xi Jinping mengunjungi beberapa negara di kawasan Afrika seperti Tanzania, Afrika Selatan, dan Republik Kongo. Pada kunjungan kali ini Presiden Xi Jinping dan mitra dari Tanzania Jakaya Kikwete menandatangani 16 perjanjian perdagangan yang berbeda termasuk perbaikan rumah sakit dan pelabuhan Tanzania, serta pembangunan pusat budaya Tiongkok (BBC.Com, 2013). Menurut Presiden Xi Jinping, konsep “*China Dream*” saling berkaitan dengan “*African dream*”, yakni Afrika menjadi kawasan yang mandiri dan berkembang (FOCAC, 2013). Dalam kesempatan lain Ketua Kuhn Foundation sekaligus penulis Robert Lawrence Kuhn mengatakan bahwa “*China Dream*” merupakan visi yang belum jelas dan berindikasi menjadi impian pribadi Pemerintah Tiongkok (Chinadaily.com, 2013).

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan pasokan minyaknya di Afrika pada periode pemerintahan Presiden Xi Jinping (2013-2019). Dengan menggunakan perspektif keamanan energi dan kebijakan luar negeri, artikel ini membahas konsep keamanan energi yang digunakan oleh Tiongkok pada periode Presiden Xi Jinping sekaligus strategi kebijakan luar negeri yang dilakukannya untuk mendukung kebijakan keamanan energi negara ini. Sejumlah studi telah dilakukan untuk mengkaji strategi kemananan energi Tiongkok,

seperti Mahardika (2017) yang menganalisis strategi keamanan energi Tiongkok di Kanada dan Ayu (2019) yang menganalisis kebijakan keamanan energi Tiongkok di Afrika periode 2000-2010. Artikel ini berbeda dengan artikel tersebut karena mengkaji strategi keamanan energi Tiongkok di Afrika dengan mengambil periode yang lebih baru, terutama pada masa pemerintahan Xi Jinping yang dimulai pada tahun 2013.

Artikel ini mengawali pembahasan dengan mendeskripsikan latar belakang kerjasama di bidang energi antara Tiongkok dengan Afrika. Setelah itu, artikel ini menganalisis hubungan kerjasama Tiongkok dengan Afrika di bidang energi.. Artikel ini berargumen bahwa di era Presiden Xi Jinping, pemerintah Tiongkok memaksimalkan diplomasi ekonominya di bawah tajuk “*China Dreams*” dengan memberikan bantuan luar negeri (*foreign aid*) berskala besar, khususnya terhadap negara-negara Afrika yang memiliki kerjasama energi dengan Tiongkok.

Konsep Keamanan Energi dan Konsep Kebijakan Luar Negeri

Untuk menganalisis strategi pemerintah Tiongkok di bawah Presiden Xi Jinping (2013-2019) dalam mengamankan pasokan energinya di Afrika, penulis menggunakan konsep Keamanan Energi dan Kebijakan sebagai pisau analisis yang relevan dalam penelitian ini. Berikut adalah penjelasan ringkas dari kedua konsep tersebut:

Konsep Keamanan Energi

Konsep Keamanan terkait erat dengan keberlangsungan hidup manusia. Ancaman dari keamanan itu sendiri dapat bersumber dari berbagai aspek, seperti isu keamanan yang bersifat tradisional: ancaman militer dan isu keamanan yang bersifat non tradisional seperti ancaman kriminalitas virtual dan pandemi virus global seperti virus Corona dewasa ini, dan lain sebagainya. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang pesat mendorong peningkatan permintaan energi minyak. Hal ini terkait erat dengan konsep keamanan energi. Keamanan energi dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana suatu bangsa dan semua warganya beserta industrinya dapat memiliki akses yang memadai terhadap sumber-sumber energi dengan harga yang wajar di masa mendatang dan bebas dari resiko maupun gangguan yang serius. Keamanan energi juga dapat dijelaskan dengan membaginya menjadi empat dimensi, yaitu; (1) adanya ketersediaan secara fisik, yaitu ketersediaan sumber daya; (2) aksesibilitas geopolitik terkait dengan kemudahan dalam mengakses sumber daya; (3) keterjangkauan dari segi ekonomi terkait harga energi; dan (4) penerimaan dari

aspek sosial dan keramahan terhadap lingkungan (Cherp, 2012: 330). Konsep keamanan energi juga didefinisikan oleh ECE (*Energy Commission for Europe*) sebagai ketersediaan suplai energi untuk konsumsi dengan harga yang ekonomis dan kuantitas yang mencukupi dalam jangka waktu yang tidak terbatas sehingga pembangunan ekonomi dan sosial sebuah negara dapat dijalankan (Energy Commission for Europe, 2007: 8)

Ketergantungan terhadap energi pada berbagai bidang kehidupan menjadikan keamanan energi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap negara beserta masyarakatnya. Permintaan energi minyak Tiongkok yang semakin meningkat mengharuskan Tiongkok untuk melakukan impor minyak dari negara lain mengingat sumber minyak dalam negeri Tiongkok yang terbatas. Hal tersebut menjadikan Tiongkok semakin bergantung terhadap pasokan minyak dari negara lain sehingga menurunkan tingkat keamanan energi negara tersebut.

Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kepentingan nasional suatu negara merupakan salah satu faktor utama bagi negara dalam menentukan kebijakannya. Kebijakan itu sendiri diartikan sebagai keputusan atau panduan dalam memilih suatu tindakan guna mencapai suatu tujuan. Kebijakan luar negeri merupakan suatu rencana yang disusun berdasarkan atas pengetahuan dan pengalaman yang digunakan oleh suatu negara dengan tujuan untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan bangsanya. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan suatu negara yang didasarkan pada informasi, pengalaman, pengetahuan, dan perencanaan untuk melakukan hubungan dengan negara lain. Kepentingan nasional merupakan referensi utama bagi setiap negara untuk mencapai tujuannya dalam melakukan hubungan luar negeri dengan negara lain (Adnan, 2014).

Kebijakan luar negeri menjadi gambaran kondisi masa depan suatu negara melalui pembuatan kebijakan yang bercita-cita untuk membawa dan memperluas pengaruh luar negeri dengan mengubah atau mempertahankan perilaku negara lain. Suatu negara memiliki berbagai alasan dalam melakukan interaksi dengan negara lain, seperti untuk tujuan-tujuan ekonomi dan perdagangan, pemanfaatan sumber daya alam, persenjataan atau militer, politik, dan lain sebagainya. Melalui kebijakan luar negerinya, suatu negara dapat mencapai tujuan yang ingin dicapainya (Adnan, 2014).

Sebagaimana telah disinggung di awal, kerjasama luar negeri yang dilakukan pemerintah Tiongkok dengan sejumlah negara di Afrika salah satunya didorong untuk mengamankan pasokan sumber daya minyak di Afrika. Oleh karena itu, agar sumber pasokan minyaknya di Afrika tetap aman, Tiongkok perlu merumuskan strategi kebijakan luar negerinya. Strategi tersebut dijalankan oleh Tiongkok dalam bentuk kebijakan luar negeri dengan harapan negara ini dapat terus memperkuat pengaruh atau hegemoninya di Afrika demi mencapai tujuan-tujuan nasionalnya. Diantara tujuan nasional yang terpenting bagi Tiongkok adalah keamanan pasokan energi minyak dalam negerinya.

Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan metode kualitatif. Berbeda dengan metode kuantitatif yang menginterpretasikan fenomena sosial, politik, dan ekonomi ke dalam angka-angka kuantitatif, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang bersifat interpretatif terhadap fenomena-fenomena tersebut, termasuk dalam hal ini adalah fenomena yang terjadi dalam disiplin ilmu hubungan internasional (Klotz & Prakash, 2008). Dalam konteks penelitian ini, data-data yang bersifat kualitatif tersebut digunakan untuk menganalisis fokus dari penelitian ini, yaitu strategi yang diambil oleh pemerintah Tiongkok, khususnya pada periode pemerintahan Xi Jinping (2013-2019) dalam mengamankan pasokan minyak negaranya dari Afrika. Penelitian ini menggunakan data-data sekunder yang diambil dari buku, artikel ilmiah, dan sumber data yang berasal dari Internet seperti berita online, dokumen-dokumen hasil persidangan internasional, dan sumber-sumber data Internet lainnya. Dengan menggunakan konsep keamanan energi dan kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis, data-data tersebut kemudian diolah, diverifikasi, dan dianalisis untuk memberikan interpretasi kualitatif mengenai fokus dari penelitian ini tersebut.

Relevansi Kebijakan di Afrika Sebelum Era Presiden Xi Jinping

Kebijakan energi Tiongkok di Afrika telah dimulai sebelum era Presiden Xi Jinping. Sebelumnya, pemerintahan Presiden Hu Jintao telah menerapkan kebijakan *Go-Out* dalam kebijakan luar negeri Tiongkok (Sun, 2014: 8). Melalui kebijakan ini, pemerintah Tiongkok memilih dan membantu 30 hingga 50 pengusaha terbaik Tiongkok untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan teknologinya agar dapat membuka pasar baru di luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk mengamankan sumber daya energi dengan mengamankan kontrak jangka panjang dengan negara

yang kaya akan energi. Upaya kebijakan keamanan energi ini menjadi penting karena setiap pemimpin Tiongkok, termasuk Presiden Hu Jintao, ingin menyelamatkan pertumbuhan ekonomi negeri ini yang dianggap terlalu cepat dengan mempertahankan stabilitas nasional dan juga faktor kelestarian lingkungan (Chinadaily.com, 2007). Tiongkok mengalami peningkatan jumlah kebutuhan minyak yang cukup signifikan. Pada rentang tahun 2000 hingga 2006, konsumsi minyak domestik Tiongkok meningkat dari 4,7 juta barel per hari menjadi 7,4 juta barel per hari (Lee & Shalmon, 2008: 110).

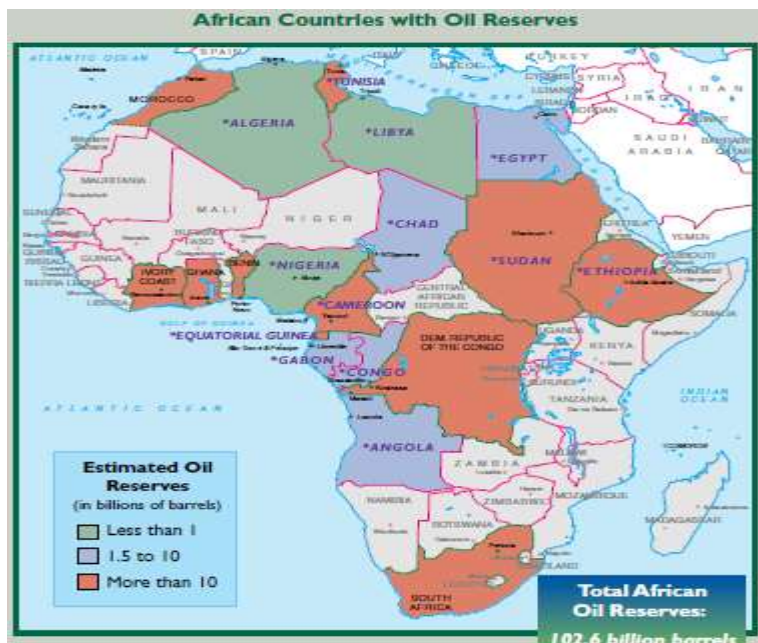
Negara Tirai Bambu ini secara bertahap meningkatkan kerjasama luar negerinya dengan Afrika melalui *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) yang dibentuk pada tahun 2000. Pada masa pemerintahan Presiden Hu Jintao, pemerintah Tiongkok lebih banyak bergantung kepada FOCAC untuk memenuhi kebutuhan energinya. Pada tahun 2006, hubungan antara Tiongkok dengan Afrika mulai mencapai tingkat seperti yang didefinisikan dalam kebijakan Afrika dengan empat pedoman utama, yaitu: (1) mengutamakan kejujuran, menjalin persahabatan, dan menjunjung kesetaraan (dalam aspek politik); (2) saling menguntungkan, dengan melakukan pertukaran dan mencapai kemajuan bersama (dalam aspek ekonomi); (3) adanya dukungan antara satu sama lain dan koordinasi yang erat (dalam aspek internasional), dan; (4) saling belajar mengenai banyak hal antara satu dengan yang lain serta berkembang bersama-sama (dalam aspek social dan budaya) (Chun, 2016: 11).

Pada tahun 2010, investasi Tiongkok di Afrika mencapai USD 2,1 milyar. Afrika menjadi tujuan utama para pebisnis Tiongkok. Hal ini mendorong sekitar 2.000 perusahaan Tiongkok untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor seperti energi, elektronik, telekomunikasi, dan transportasi. Namun, dengan meningkatnya jumlah investasi di Afrika, muncul sejumlah permasalahan yang mendera Tiongkok, diantaranya adalah penyerangan terhadap pertambangan minyak Tiongkok di Afrika, penculikan para pekerja Tiongkok di Afrika, bahkan pembunuhan warga Tiongkok oleh warga Afrika yang menolak kehadiran Tiongkok di Afrika, adanya penolakan warga Afrika terhadap masuknya investasi Tiongkok di sektor pertambangan, serta sejumlah instabilitas politik domestik di negara-negara di Afrika menjadi ancaman yang serius bagi keamanan investasi dan warga Tiongkok di Afrika (Sun, 2014: 9).

Kerjasama Tiongkok dengan Afrika dalam Bidang Minyak Mentah

Tingginya tingkat permintaan minyak dalam negeri Tiongkok mengharuskan Tiongkok untuk mengimpor minyak dari luar negeri. Salah satu wilayah yang dipilih Tiongkok untuk memenuhi kebutuhan minyak dalam negerinya tersebut adalah Afrika. Afrika sebagai salah satu kawasan yang kaya akan energi minyak menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah Tiongkok guna meningkatkan hubungan kerjasamanya dalam hal energi khususnya minyak mentah (Wenping, 2007: 24). Nilai perdagangan antara Tiongkok dan Afrika meningkat tajam, dari USD 9 Miliar di tahun 2000, menjadi USD160 Miliar di tahun 2011, FDI (*Foreign Direct Investment*) Tiongkok di Afrika juga melebihi angka USD 13 Miliar pada tahun 2010. Selain itu, pada tahun 2004, 28,7% kebutuhan akan sumber daya minyak Tiongkok diimpor dari negara-negara penghasil minyak Afrika. Pada bulan April 2006, *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) menyebutkan bahwa Tiongkok telah menghabiskan dana sebesar USD 2,3 milyar untuk membeli 45% saham di pertambangan minyak di Nigeria. Sebelumnya pada tahun 2004, 28,7% kebutuhan akan sumber daya minyak Tiongkok diimpor dari negara-negara penghasil minyak Afrika. Kemudian pada tahun 2005, Afrika menjadi eksportir utama minyak bagi Tiongkok (Hurst, 2006: 4). Berikut adalah peta negara-negara penghasil minyak di Afrika.

Gambar 1 – Peta negara-negara penghasil minyak di Afrika



Sumber: Foerstel (2000)

Sejak Tiongkok menjadi negara pengimpor minyak pada tahun 1993, negara ini mulai menjalin hubungan kerjasama dalam sektor minyak dengan Afrika di Sudan (Looy, 2006: 2). Pada saat itu, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Tiongkok, *China National Petroleum Corporation* (CNPC), ditugaskan untuk melakukan investasi di sektor minyak di Sudan. Hingga tahun 2000, kerjasama Tiongkok dengan Afrika dalam konteks minyak terbatas hanya di negara Sudan saja. Namun, pada tahun 2001, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) melarang Sudan untuk melakukan ekspor minyaknya ke Tiongkok (Global Timber, 2012). Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghentikan dukungan pemerintah Sudan di Darfur terhadap praktik genosida. Namun, alih-alih pelarang tersebut, hingga kini hubungan kerjasama minyak antara Tiongkok dan negara-negara di Afrika tetap berjalan. Tidak hanya Sudan, untuk menjamin pasokan minyaknya di masa mendatang Tiongkok pun memperluas kerjasama minyaknya dengan berinvestasi di negara lain di Afrika seperti Angola dan Nigeria (Hanauer & Morris, 2014: 12).

Angola merupakan salah satu mitra dagang terbesar Tiongkok di kawasan Afrika. Minyak mewakili 95 persen dari seluruh ekspor Angola dan merupakan komoditi impor utama Tiongkok di Angola. Di Sudan dan Angola, sektor minyak masih terbuka untuk investasi asing dan sebagian besar belum dimonopoli oleh Amerika Serikat maupun Eropa sebagai pemain global dalam industri ini. Kontrol maupun pengaruh Amerika Serikat atas energi di wilayah seperti Sudan maupun Angola masih lemah karena alasan-alasan politis (Aurora, 2012: 54). Pada tahun 2004, hubungan antara Tiongkok dengan Angola memasuki tingkat yang lebih tinggi. Pada bulan Maret 2004, Tiongkok dan Angola menandatangani pemberian pinjaman sebesar USD 2 miliar dari *Export-Import Bank of China (EximBank)* kepada Angola untuk mendanai rekonstruksi infrastruktur Angola yang hancur akibat konflik dengan kompensasi penyaluran pasokan minyaknya untuk Tiongkok. Pada tahun yang sama, *China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec)* membeli 50 persen saham minyak milik Shell di Angola (Campos & Vines, 2007: 12).

Hubungan kerjasama perdagangan minyak antara Tiongkok dengan Angola terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012, produksi minyak Angola mencapai 1,75 juta barel per harinya dan meningkat 2 juta barel per hari pada tahun 2014 (Quigley, 2014). Hampir setengah produksi minyak Angola diimpor ke Tiongkok, sehingga pada tahun 2009 hingga 2012 Tiongkok menghabiskan dana sebesar USD 92 milyar untuk investasi minyak di negara tersebut. Di samping itu, salah satu faktor Tiongkok memilih kawasan Afrika sebagai sumber pasokan minyaknya disebabkan karena karakter minyak mentah dari kawasan ini sesuai dengan fasilitas penyulingan

yang dibangun oleh Tiongkok. Minyak tersebut memiliki kandungan sulfur yang rendah dan sesuai dengan fasilitas penyulingan di Tiongkok (Hong, 2009: 3). Pada tahun 2015, Angola menjadi eksportir minyak kedua terbesar ke Tiongkok setelah Arab Saudi. Kemudian pada bulan September 2016, Angola menjadi pemasok terbesar minyak mentah Tiongkok. Pasokan ini melebihi Irak, Arab Saudi, dan Rusia. Pada bulan September 2016, Tiongkok mengimpor minyak dari Angola sebanyak 4,19 juta ton atau 1,02 juta barel per harinya (PwC, 2015: 25).

Hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Afrika semakin meningkat. Hingga tahun 2005, Nigeria menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok. Atas dasar kesepakatan tersebut, Nigeria mendapatkan USD 8000 juta dari Tiongkok dan Nigeria mengirimkan sebanyak 30.000 barel minyak mentahnya per hari ke Tiongkok (Koch, 2008: 13). Pada tahun 2014, Nigeria merupakan mitra dagang terbesar ketiga Tiongkok di Afrika. Kemudian, pada tahun 2015, total ekspor minyak Nigeria ke Tiongkok mencapai satu juta barel atau 1.3 persen dari ekspor minyak tahunan Nigeria (Vanguard, 2016). Bahkan pada tahun 2016, pemerintah Tiongkok berusaha untuk meningkatkan impor minyaknya dari Nigeria. Selain itu pada tahun 2016, Nigeria dan Tiongkok sepakat untuk meningkatkan infrastruktur minyak dan gas di Nigeria (Fick, 2016).

Potensi Kerjasama Minyak Tiongkok dengan Afrika

Sejak tahun 1950-an hubungan antara Tiongkok dan Afrika telah berjalan dengan baik. Pada awalnya, hubungan Tiongkok dengan Afrika hanya terbatas dalam hal politik. Namun, setelah Tiongkok melakukan reformasi kebijakan terutama dalam hal ekonomi, hubungan antara Tiongkok dengan Afrika mengalami perubahan. Sejak adanya reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah Tiongkok, kepentingan ekonomi dan geostrategi menjadi tujuan utama Tiongkok dalam melakukan hubungan luar negerinya dengan Afrika (Berhe & Hongwu, 2013: 1). Dengan adanya reformasi kebijakan yang lebih terbuka pada dunia luar mendorong Tiongkok untuk meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonominya (Aurora, 2012: 26). Selain itu, dengan semakin meningkatnya kekuatan ekonomi dan politik Tiongkok serta kepentingan Tiongkok terhadap sumber daya di Afrika, hubungan antara Tiongkok dan Afrika pun juga semakin intensif.

Terlebih lagi setelah dibentuknya forum kerjasama Tiongkok dan Afrika, yakni *Forum on China-Africa Cooperation* (FOCAC) yang semakin mempererat hubungan Tiongkok dengan

sejumlah negara di Afrika. FOCAC secara resmi dibentuk pada bulan Oktober 2000 di Beijing atas inisiatif bersama Tiongkok dan Afrika dengan tujuan untuk memperkuat kerjasama antara Tiongkok dengan negara-negara di Afrika (FOCAC, 2004). Karakter kerjasama dalam FOCAC terbagi menjadi dua yaitu; (1) *Pragmatic Cooperation* yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas kerjasama; dan (2) *Equality and Mutual Benefit* yang bertujuan untuk mempromosikan dialog politik serta kerjasama ekonomi dan perdagangan (FOCAC, 2004). FOCAC memberikan peluang yang besar bagi Tiongkok maupun negara-negara di Afrika untuk melakukan kerjasama berbagai bidang yang lebih luas dan tidak terbatas pada sektor energi saja. Hal ini dapat dimaknai bahwa melalui FOCAC, Tiongkok dan negara-negara di Afrika berharap agar kerjasama dilandaskan pada prinsip yang saling menguntungkan sehingga tidak saja hanya akan menguntungkan Tiongkok, tetapi juga negara-negara di Afrika.

Sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi dan sebagai pengimpor minyak terbesar di dunia, permintaan domestik minyak Tiongkok sangatlah tinggi. Pada bulan September 2016, Tiongkok mengimpor minyak sebanyak 8,08 juta barel per hari, melebihi Amerika Serikat yang hanya mengimpor 8,00 juta barel perhari (Sell, 2016). Hal tersebut dapat menjadi peluang dan memberikan keuntungan bagi negara-negara di Afrika yang kaya akan minyak. Menguatnya kepentingan ekonomi Tiongkok di Afrika juga terlihat dari adanya peningkatan arus investasi dari Tiongkok ke negara-negara Afrika dalam berbagai sektor. Investasi Tiongkok di sektor pertambangan sebesar 72%, sektor jasa sebesar 24%, dan sektor industri sebesar USD 200 juta (Hong, 2009: 24) Tingkat permintaan minyak Tiongkok yang tinggi terhadap minyak Afrika menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara-negara di Afrika.

Tidak hanya itu, bagi Afrika, Tiongkok juga turut berkontribusi dalam pembangunan ekonomi di kawasan ini melalui investasi maupun dari bantuan langsung yang diberikan oleh Tiongkok. Investasi perusahaan-perusahaan Tiongkok di kawasan Afrika tersebut sebagian besar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur industri ekstraktif, termasuk pembangunan jalan, kilang minyak, dan bangunan fisik (Madavo, 2007). Hal ini menguntungkan bagi negara-negara di Afrika karena investasi tersebut dapat memperluas dan mengembangkan industri ekstraktif mereka. Misalnya di Angola, Sinopec (BUMN milik Tiongkok) dan Sonangol (BUMN milik Angola) membentuk *Joint Venture* Sinopec-Sonangol International untuk mengembangkan proyek kilang minyak baru di Lobito (Taylor, 2012: 48). Sinopec melakukan joint venture dengan Sonangol untuk melakukan eksplorasi minyak mentah di tiga tambang minyak lepas pantai

Angola. Sinopec memiliki 75% saham sementara Angola memiliki 25% saham. Guna meloloskan proyek ini, Sinopec memberikan bonus tandatangan (*signature bonus*) sebesar USD 2,2 Milyar dan investasi pada proyek sosial sebesar USD 200 juta (Foster, 2019). Kerjasama tersebut meningkatkan kapasitas sektor ekstraktif lokal dan berpotensi untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal serta meningkatkan pendapatan daerah di negara tersebut.

Diperkirakan total cadangan minyak Afrika masih mencapai 129,1 milyar barel atau 7,6% dari total produksi minyak global (PwC, 2016: 5). Selama tahun 2015, Afrika memproduksi minyak sebanyak 8,4 juta barel per hari dan 77% dari produksi tersebut berasal dari Nigeria, Algeria, Mesir, dan Angola. Banyaknya cadangan minyak di Afrika merupakan potensi yang baik bagi Tiongkok untuk memenuhi permintaan minyak domestik negeri itu. Selain itu, kebutuhan Afrika terhadap investasi infrastruktur yang tinggi menjadi potensi bagi pemerintah Tiongkok untuk mempermudah perusahaan-perusahaannya masuk ke wilayah Afrika. Dengan melakukan penawaran investasi tersebut, perusahaan Tiongkok lebih mudah mendapatkan izin dari pemerintah untuk mengeksplorasi minyak di Afrika.

Kebijakan Luar Negeri Tiongkok di Afrika Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping

Pada masa pemerintahan Presiden Xi Jinping sejak tahun 2013 hingga 2016, terdapat beberapa penambahan atau penyempurnaan terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok. Konsep *Harmonious World* yang sebelumnya digunakan oleh pemerintah Presiden Hu Jintao diganti menjadi konsep *China Dream*. Konsep *Harmonious World* di era Presiden Hu Jintao ini memberi tumpuan pada komitmen Tiongkok untuk mempromosikan perdamaian dunia dengan cara mengurangi berbagai konflik yang terjadi. Sementara konsep “*China dream*” di era Presiden Xi Jinping menggunakan konsep kekuatan diplomasi yang kental dengan karakteristik Tiongkok. Penggunaan kekuatan diplomasi sebagai tumpuan ini adalah pendekatan kebijakan luar negeri yang relatif baru digunakan oleh pemerintah Tiongkok (Masuda, 2016).

Pada prinsipnya, tujuan-tujuan konsep *China Dream* tersebut dibagi menjadi empat dimensi, yakni: (1) *Strong China* (kuat secara ekonomi, politik, diplomasi, ilmu pengetahuan, dan militer); (2) *Civilized China* (ekuitas dan keadilan, budaya yang kaya, dan moral yang tinggi); (3) *Harmonious China* (persahabatan antar kelas sosial), dan (4) *Beautiful China* (lingkungan yang sehat dan tingkat polusi yang rendah). Agar tujuan tersebut dapat tercapai, salah satu cara yang

digunakan oleh Presiden Xi Jinping adalah dengan menggunakan konsep kekuatan diplomasi dengan karakteristik Tiongkok (Kuhn, 2013).

Adanya perbedaan konsep yang digunakan oleh pemerintahan Presiden Xi Jinping tersebut membawa dampak perubahan terhadap kebijakan luar negeri Tiongkok dibandingkan dengan periode sebelumnya di era Presiden Hu Jintao. Pada era Presiden Xi Jinping, kebijakan luar negeri Tiongkok mengimplementasikan pendekatan yang lebih proaktif dan asertif sehingga meningkatkan peran diplomasi Tiongkok dalam pentas perpolitikan internasional. Kebijakan luar negeri ini juga merefleksikan keinginan Tiongkok untuk memanfaatkan kekuataannya, terutama kekuatan ekonominya, yang semakin berkembang (Swaine, 2015). Beberapa strategi yang diambil oleh pemerintah Tiongkok untuk meningkatkan efektivitas kebijakan luar negerinya yang bertumpu pada kekuatan ekonominya dilakukan melalui sektor perdagangan, investasi, dan memberikan bantuan internasional dalam skala besar terutama bagi negara-negara yang tergabung dalam FOCAC.

Mempromosikan Konsep China Dream

Tradisi penggunaan konsep atau visi misi bernegara dalam setiap kepemimpinan Tiongkok merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan politik Tiongkok. Sejak masa pemerintahan Mao Zedong (1949-1978) hingga masa pemerintahan Presiden Xi Jinping (2013-sekarang) penggunaan konsep yang mencerminkan cita-cita serta tujuan yang ingin diwujudkan oleh Tiongkok telah digunakan. Konsep tersebut dijadikan sebagai alat propaganda untuk menginformasikan dan mendidik masyarakat Tiongkok mengenai kebijakan yang sedang dijalani oleh pemerintah Tiongkok. Presiden Xi Jinping mendeskripsikan *China Dream* sebagai peremajaan nasional, peningkatan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, pembangunan kehidupan sosial, dan penguatan militer (Tembe, 2015: 2).

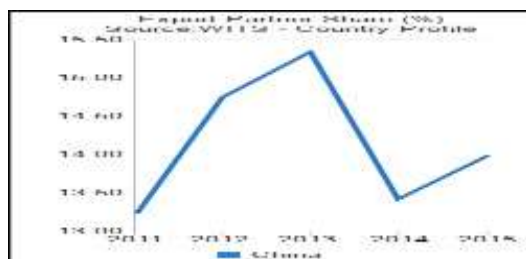
Konsep *China Dream* tidak hanya dipromosikan di dalam negeri saja, tetapi juga ke berbagai wilayah di Asia-Pasifik, Amerika Latin, dan tentunya Afrika. Bagi Tiongkok, *China Dream* bukan hanya sekedar agenda politik saja, namun juga sebagai alat yang dapat menjadikan Tiongkok aktor utama dalam dunia internasional (Fasulo, 2016: 14). Bahkan di Afrika, konsep *China Dream* telah mendapatkan respon yang baik untuk diwujudkan dan direfleksikan dalam bentuk *African Dream*. Pada bulan Maret 2013, dalam kunjungannya ke Tanzania, Presiden Xi Jinping mengatakan bahwa pertukaran budaya antara orang ke orang mengenai budaya Tiongkok

dan Afrika perlu dilandasi dengan prinsip saling pengertian terhadap budaya Tiongkok dan Afrika sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan persepsi yang baik diantara warga Afrika dan Tiongkok (China Embassy, 2013). Konsep *African Dream* yang disampaikan oleh Presiden Xi Jinping di Tanzania tersebut menjadi daya tarik sendiri bagi Afrika. Beberapa negara di Afrika kemudian menggunakan konsep *African Dream* yang mencerminkan cita-cita nasional mereka yang disampaikan baik di dalam maupun di luar forum kerjasama Tiongkok dengan Afrika. Penggunaan *African Dream* dalam kerangka *China Dream* menjadi salah satu pendekatan *soft power* Tiongkok di Afrika untuk mendapatkan dukungan dari Afrika dalam mewujudkan agenda politik domestik maupun internasional Tiongkok, khususnya kemudahan untuk mengamankan pasokan minyaknya tanpa adanya gejolak atau perlawanan dari masyarakat lokal.

Sektor Perdagangan dan Investasi

Tidak hanya dalam sektor energi minyak saja, Tiongkok juga melakukan hubungan ekonomi dengan Afrika dalam berbagai sektor. Hal tersebut dapat menciptakan ketergantungan ekonomi bagi negara-negara di Afrika tidak hanya pada sektor energi namun juga sektor lainnya. Sebagian besar ekspor Afrika ke Tiongkok merupakan sumber daya alam, seperti minyak maupun sumber daya mineral lainnya yang dapat mendukung pertumbuhan industri Tiongkok. Sementara ekspor Tiongkok ke Afrika sebagian besar merupakan produk hasil manufaktur. Pada masa Presiden Xi Jinping, nilai perdagangan antara Tiongkok dengan Afrika mengalami peningkatan yang cukup pesat meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2014 dan kembali meningkat di tahun 2015. Pada tahun 2015, Tiongkok menjadi mitra dagang terbesar bagi Afrika dengan nilai rata-rata pertumbuhan perdagangan tahunan sebesar 13.99% (WITS, 2017). Hal tersebut dapat dilihat melalui grafik berikut.

Gambar 2 – Pertumbuhan Perdagangan Tahunan Afrika dengan Tiongkok 2011-2015



Sumber: World Integrated Trade Solution (2015)

Sejak tahun 2000 hingga 2015 proyek investasi Tiongkok di Afrika mengalami peningkatan yang signifikan, hal ini tercerminkan melalui proyek investasi Tiongkok di Afrika yang meningkat menjadi 576 proyek pada tahun 2015 (Zheng, 2016). Berdasarkan data yang didapat dari *World Trade Organization* (WTO) investasi Tiongkok di Afrika mengalami kenaikan. Investasi di tahun 2010 sebanyak USD 292 juta sedangkan sampai tahun 2018 investasi berada di angka USD 812 juta (World Trade Organization, 2019). Tujuan utama destinasi investasi Tiongkok di Afrika tidak hanya ditujukan bagi negara-negara yang miskin saja, namun juga bagi negara-negara yang dapat menguntungkan Tiongkok dalam sektor energi ataupun perdagangan seperti Nigeria, Afrika Selatan, Zambia, dan Angola.

Pada periode Presiden Xi Jinping, investasi banyak diarahkan dalam bidang infrastruktur seperti transformasi pertanian dan pengembangan industri di Afrika. Kesepakatan pembangunan infrastruktur antara Tiongkok dan Afrika menjadikan negara-negara di Afrika kembali bergantung pada Tiongkok melalui sumber daya alamnya. Hal ini dikarenakan model pinjaman yang diberikan oleh Tiongkok di Afrika merupakan pinjaman yang didukung dengan menjadikan konsesi sumber daya alam sebagai jaminannya, terutama minyak (Sun, 2014).

Bantuan Luar Negeri (Foreign Aid)

Seiring berkembangnya waktu, kebijakan bantuan asing Tiongkok memiliki karakter yang berbeda dari bantuan asing yang diberikan oleh negara pendonor lainnya. Hal tersebut dikarenakan bantuan asing Tiongkok selalu disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Tiongkok maupun kondisi dari negara penerimanya sendiri. Pada era Presiden Xi Jinping, Tiongkok melakukan reformasi sistem administrasi bantuan asingnya. Pada bulan November 2014, Kementerian Perdagangan Tiongkok mengeluarkan aturan dan panduan mengenai pengelolaan bantuan asing (MOFCOM, 2014).

Reformasi kebijakan sistem administrasi bantuan asing Tiongkok tersebut memberikan perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek kebijakan bantuan asing Tiongkok, sebagai berikut:

1. Transformasi Fungsi Pemerintah

Sebelumnya, aspek administrasi bantuan asing mengalami banyak kekurangan. Namun, setelah dilakukan reformasi sistem administrasi, terjadi penguatan dari segi landasan hukum

bantuan asing yang berbentuk undang-undang, perumusan aturan dan panduan bantuan asing yang lebih komprehensif, serta perumusan evaluasi proyek bantuan asing dengan memperkuat manajemen perencanaan untuk jangka menengah dan panjang.

2. Inovasi Pelaksanaan dan Pengelolaan Proyek Bantuan Asing

Beberapa negara penerima bantuan asing semakin memiliki kemampuan untuk mengerjakan beberapa proyek infrastruktur secara mandiri. Hal ini mendorong Tiongkok untuk memberlakukan pendekatan lokal yang diterapkan Tiongkok secara bertahap melalui promosi kerjasama dengan negara penerima dan mempercayai negara tersebut untuk mengerjakan beberapa proyek pembangunan secara mandiri. Kebijakan tersebut berbeda dengan kebijakan pemerintahan sebelumnya. Saat ini semua proyek bantuan asing tidak ditangani sepenuhnya oleh pemerintah Tiongkok.

3. Mengoptimalkan Sistem Penawaran Asing yang Kompetitif

Bagi Tiongkok, hal ini merupakan salah kunci sukses terhadap keberhasilan suatu proyek. Tiongkok akan memilih perusahaan terbaik untuk melakukan proyek terbaik. Sehingga, sistem pengelolaan penawaran bantuan luar negeri harus dioptimalkan dan mekanisme penetapan harga yang wajar juga harus dilakukan.

Reformasi kebijakan sistem administrasi bantuan asing Tiongkok tersebut memberikan dampak positif terhadap penyaluran bantuan asing Tiongkok di Afrika. Pada era Presiden Xi Jinping, Tiongkok meningkatkan jumlah bantuannya di Afrika. Hal tersebut dinyatakan oleh Presiden Xi Jinping dalam pertemuan FOCAC ke-6 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan. Pada pertemuan tersebut, Presiden Xi Jinping berjanji memberikan USD 60 milyar kepada Afrika yang mencakup USD 5 milyar dalam bentuk hibah dan pinjaman tanpa bunga, dan USD 35 milyar dalam bentuk pinjaman istimewa, pinjaman lunak, dan kredit ekspor, USD 5 milyar lainnya akan dimasukkan dalam mekanisme *China-Africa Development Fund*, USD 5 milyar dalam bentuk pinjaman khusus yang ditujukan untuk pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Afrika, dan USD 10 milyar untuk menciptakan dan menawarkan modal awal dana kerjasama kapasitas produksi Tiongkok dan Afrika untuk proyek-proyek baru (Robertson & Benabdallah, 2016). Pemberian bantuan asing tersebut dioptimalkan untuk meningkatkan kerjasama industri Tiongkok dan Afrika, pembangunan infrastruktur, dan mengembangkan sumber daya energi, pertanian, dan

manufaktur di Afrika, dan diprioritaskan untuk diberikan kepada negara-negara di Afrika dengan sumber minyak yang berlimpah serta negara-negara yang dapat menguntungkan Tiongkok dalam sektor perdagangan.

Menambah Butir Kerjasama dalam FOCAC (Forum on China-Africa Cooperation)

Salah satu strategi Tiongkok agar akses sumber pasokan minyaknya di Afrika tetap aman yaitu melalui forum FOCAC. Pertemuan FOCAC ke-6 yang berlangsung pada 4 Desember 2015 di Johannesburg, Afrika Selatan, menghasilkan dua dokumen penting guna meningkatkan kerjasama antara Tiongkok dengan Afrika, yaitu *The Johannesburg Declaration* dan *The Johannesburg Action Plan (2016-2018)*. Dokumen tersebut berisi rencana hubungan kerjasama komprehensif antara Tiongkok dengan Afrika dan praktik kerjasama untuk tiga tahun ke depan dengan gagasan dan kebijakan baru yang disebut dengan 1+5+10 (Xuejun, 2016). Dalam deklarasi yang diterbitkan dalam web resmi FOCAC tersebut, Tiongkok mengupayakan kemajuan yang harmonis dari kedua negara dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang seperti bantuan pembangunan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, berbagi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tiongkok juga terus berkomitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi masalah keamanan dan menjaga perdamaian kedua negara, serta tetap teguh dalam berkoordinasi untuk bekerja sama satu sama lain demi mendapatkan kepentingan bersama (FOCAC, 2015).

Terdapat satu hal yang dapat merepresentasikan posisi baru hubungan Tiongkok dengan Afrika. Indikatornya antara lain adalah baik Tiongkok maupun pihak Afrika sepakat untuk memperbarui skema Kemitraan Strategis Baru (*New Strategic Partnership*) menjadi Kemitraan Strategis yang Komprehensif (*Comprehensive Strategic Partnership*). Kemitraan tersebut merepresentasikan lima pilar utama, yaitu; (1) *Equality and mutual trust in politics*; (2) *Win-win cooperation in the economy*; (3) *Mutually enriching cultural exchanges*; (4) *Mutual assistance in security and solidarity*; dan (5) *Coordination in international affairs*. Lima pilar utama tersebut bertujuan untuk memperkuat pondasi hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Afrika dan sebagai pilar kemitraan strategis komprehensif kedua negara tersebut.

Selain lima pilar tersebut juga terdapat Sepuluh Rencana Kerjasama (*Ten Key Cooperation Plans*) antara Tiongkok dan Afrika. Sepuluh butir rencana kerjasama tersebut yaitu; (1) *China-Africa industrialisation plan*; (2) *China-Africa agricultural modernisation*; (3) *China-Africa infrastructure plan*; (4) *China-Africa financial plan*; (5) *China-Africa green development plan*;

(6) *China-Africa trade and investment facilitation plan*; (7) *China-Africa poverty reduction plan*; (8) *China-Africa public health plan*; (9) *China-Africa cultural people to people plan*, dan (10) *China-Africa peace and security plan*. Gagasan 1+5+10 dalam FOCAC ini diyakini akan semakin memperkuat hubungan kerjasama antara Tiongkok dengan Afrika yang didasarkan atas prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.

Dalam kesempatan yang sama pada saat KTT FOCAC dilaksanakan, beberapa pejabat negara Afrika menyatakan dukungannya terhadap bantuan dan kerjasama yang telah diberikan Tiongkok. Menurut Hoze Riruako, analis politik dan dosen di Universitas Namibia, “Afrika telah lama mencari mitra kerjasama yang dapat saling menguntungkan, dan Tiongkok telah terbukti data menjadi mitra kerjasama yang baik.” (Xinhuanet, 2018) Kondisi tersebut selaras dengan prinsip FOCAC untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik, sikap saling menghormati, dan menjalin kerja sama antara Tiongkok dan Afrika secara komprehensif.

Tabel 1. Realisasi Kebijakan Presiden Xi Jinping di Afrika

Presiden Xi Jinping	
Strategi	Memperkenalkan konsep China Dream melalui berbagai forum dan media. Tujuannya untuk memperbaiki citra buruk aktivitas Tiongkok di Afrika di mata masyarakat Afrika dan dunia internasional.
Perdagangan	Memperluas cakupan perdagangan yang tujuannya untuk mengikat negara-negara di Afrika sehingga tergantung kepada Tiongkok secara ekonomi. Terbukti sejak tahun 2013 nilai perdagangan antara Afrika dan Tiongkok meningkat dari USD 92,57 Milyar dan pada tahun 2018 menjadi USD 104,95 Milyar (China Africa Research Initiative, 2019)
Investasi	Meningkatkan investasi khususnya pada bidang infrastruktur dengan tujuan untuk mempermudah akses terhadap sumber-sumber minyak. Dalam laporan resmi Tiongkok, investasi terus meningkat sejak tahun 2003. Pada tahun 2003 hingga 2018, jumlahnya telah meningkat dari USD 75 Juta menjadi USD 5,4 Milyar. (China Africa Research Initiative, 2019)
Bantuan Asing	Mereformasi sistem administrasi bantuan asing Tiongkok dan meningkatkan bantuan asing Tiongkok ke Afrika sejak tahun 2013 yang bernilai USD 631 Juta menjadi USD 3 Miliar pada tahun 2015 hingga tahun 2018 (China Africa Research Initiative, 2019).
FOCAC	Menambah butir-butir kerjasama dalam FOCAC agar dapat tercapai kerjasama yang bersifat komprehensif

Simpulan

Artikel ini telah mengkaji strategi Tiongkok dalam mengamankan pasokan minyaknya di Afrika. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder, artikel ini menggunakan konsep keamanan energi dan kebijakan luar negeri untuk menganalisis strategi Tiongkok dalam mengamankan pasokan energinya, terutama minyak, di Afrika mengingat kebutuhannya terhadap sumber energi ini terus meningkat sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonominya yang pesat. Studi ini menemukan bahwa kebijakan keamanan energi dan kebijakan luar negeri yang diterapkan pada era pemerintahan Hu Jintao (2003-2013) meletakkan fondasi awal yang berguna bagi kerjasama Tiongkok dengan Afrika dalam bidang energi. Namun, seiring dengan meningkatnya ekspansi dan eksplorasi minyak di sejumlah negara Afrika yang menjadi partner Tiongkok, terjadi sejumlah masalah mulai dari penentangan warga lokal terhadap para pekerja tambang Tiongkok dan tuntutan negara-negara Afrika terhadap Tiongkok akan pentingnya aspek kesetaraan dan keadilan dalam kerjasama energi ini, termasuk tuntutan akan perlunya transfer teknologi dalam sektor-sektor penting pembangunan.

Studi ini menemukan bahwa di era pemerintahan Presiden Xi Jinping (2013-2019), pemerintah Tiongkok memperbaiki pendekatan diplomasinya. Dengan konsep China Dream, pemerintah Tiongkok meningkatkan besaran dan efektivitas bantuan asingnya (*foreign aid*), khususnya kepada negara-negara Afrika dengan harapan mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mengamankan pasokan minyaknya di Afrika sekaligus untuk meredam gejolak penentangan masyarakat lokal di sejumlah negara-negara Afrika yang menjadi mitra kerjasama energi dengan Tiongkok. Tiongkok juga memaksimalkan upaya diplomasinya melalui FOCAC (*Forum on China-Africa Cooperation*) dengan meningkatkan skema kerjasamanya dengan Afrika menjadi kerjasama yang lebih komprehensif dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan.

Referensi

- Adnan, M. (2014). Foreign Policy and Domestic Constraints: A Conceptual Account. *South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies*, Vol. 29, No. 2, .
- Arase, D. (2015). *Xi Jinping's Foreign and Domestic Policy Agendas*. Diakses Februari 25, 2017, dari Pidato Ilmiah Profesor Internasional Hopkins-Nanjing Center dalam Diplomatic Academy of Vietnam: www.kas.de/wf/doc/kas_17693-1442-34-30/pptx%3F151130082553+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id

- Aurora, C. (2012). *Kebijakan Keamanan Energi Cina : Studi Kasus Diplomasi Energi Cina di Afrika*. hal. 1-148.
- BBC.Com. (2013). *China President Xi Jinping hails ties with Africa*. Diakses dari [bbc.com: https://www.bbc.com/news/world-africa-21923775](http://www.bbc.com/news/world-africa-21923775)
- Berhe, M. G., & Hongwu, L. (2013). *China-Africa Relations: Governance, Peace and Security*. Ethiopia: Institute for Peace and Security Studies.
- Campos, I., & Vines, A. (2007). *Angola and China: A Pragmatic Partnership*. Working Paper Presented at a CSIS Conference, "Prospects for Improving U.S.-China-Africa Cooperation".
- Cherp, A. (2012). *Energy and Security*. . Laxenburg: International Institute for Applied Systems Analysis.
- China Africa Research Initiative. (2019). Diakses dari China Africa Research Initiative: <http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa#:~:text=Chinese%20FDI%20in%20Africa%20Data%20Overview&text=Dari%202003%20to%202018%2C%20the,US%245.4%20billion%20in%202018.&text=As%20sh own%20in%20the%20chart,have%20been%20declining%20since%202010>
- Chinadaily.com. (2007). *China's Energy Conditions and Policies*. Diakses dari https://www.chinadaily.com.cn/china/2007-12/26/content_6349803.htm
- Chinadaily.com. (2013). *Experts Interpret the Chinese Dream*. Diakses dari Chinadaily.com: https://www.chinadaily.com.cn/china/2013-12/08/content_17159773.htm
- ChinaEmbassy. (2013). *China Embassy*. Diakses dari China Embassy.org: <http://ie.china-embassy.org/eng/zt/chinesedream/t1075135.htm#:~:text=Recently%2C%20the%20new%20Chinese%20administration,of%20the%20African%20people%2C%20and>
- Chinawhitepaper. (2019). *China's Energy Conditions and Policies*. Diakses dari China.org: <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237089.htm>
- Chun, Z. (2016). *The Sino-Africa Relationship: Toward a New Strategic Partnership*. . London: London School of Economics.
- DW.Com. (2017). *'The Chinese Dream' and Xi Jinping's Power Politics*. Diakses dari DW.Com: <https://www.dw.com/en/the-chinese-dream-and-xi-jinpings-power-politics/a-41941966>
- EnergyComissionforEurope. (2007). *Emerging Global Energy Security Risks*. Geneva: United Nations Publication.
- Fasulo, F. (2016). Waking dari the China Dream. dalam A. Amighini, *China Dream: Still Coming True*. Milan: ISPI Report.
- Fick, M. (2016). *Nigeria Unveils Energy Infrastructure Deals with China*. Diakses April 5, 2017, dari FinancialTimes: <https://www.ft.com/content/c8130652-3ec8-11e6-9f2c-36b487ebd80a>.
- FMPRC. (2013). *Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China*. Diakses dari Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18035.shtml
- FOCAC. (2004). *Characteristic of FOCAC*. Diakses pada April 6, 2017, dari FOCAC: <http://www.focac.org/eng/gylt/ltjj/t157576.htm>.
- FOCAC. (2013). *Xi's Visit Starts New Era of China-Africa Ties*. Diakses Februari 25, 2017, dari FOCAC: <http://www.focac.org/eng/zt/1/t1027918.htm>.
- FOCAC. (2015). *Forum on China-Africa Cooperation*. Diakses dari focac.org: http://www.focac.org/eng/zywx_1/zywj/t1327960.htm

- Foerstel, K. (2000). *China in Africa: Is China Gaining Control of Africa's Resources?* Washington D.C.: CQ Press.
- Foster, V. (2019). *Building Bridges: China's Growing Role as Infrastructure Financier for Sub-Saharan Africa*. World Bank.
- Glaser, B. S. (2004). *Chinese Foreign Policy under Xi Jinping: Continuity and Change. Critical Issues Confronting China Seminar Series*. Cambridge: Harvard University Asia Center.
- Global Timber. (2012). *China's Import of Fossil Fuel*. Diakses Maret 30, 2017, dari Global timber: <http://www.globaltimber.org.uk/ChinaCrudeOilImports.htm>.
- Gov, C. (2017). *China Government*.
- Hanauer, L., & Morris, J. (2014). *Chinese Engagement in Africa: Drivers, Reaction, and Implications for U.S. Policy*. Washington D.C.: Rand Corporation.
- Hong, Z. (2009). *China's New Energy Diplomacy in Africa: Progress and Problems*. Malaysia: Institute of China Studies University of Malay.
- Hurst, C. (2006). *China's Oil Rush in Africa*. Washington, . D.C.: The Institute for the Analysis of Global Security.
- Jiahua, D. P. (2006). *Understanding China's Energy Policy: Economic Growth and Energy Use, Fuel Diversity, Energy/Carbon Intensity, and international Cooperation*. Beijing: Research Centre for Sustainable Development Chinese Academy of Social Science.
- Klotz, A., & Prakash, D. (2008). *Qualitative Methods in International Relations: A Pluralist Guide*. New York: Palgrave Macmillan.
- Koch, K. (2008). *China in Africa: Is China Gaining Control of Africa's Resources?* . Washington D.C.: CQ Press.
- Kuhn, R. L. (2013). *Xi Jinping's Chinese Dream*. Diakses pada 25 Februari 2017, dari New York Times: <http://www.nytimes.com/2013/06/05/opinion/global/xi-jinpings-chinese-dream.html>.
- Lee, H., & Shalmon, D. (2008). Searching for Oil: China's Oil Strategies in Africa. In R. I. Rotberg, *China into Africa: Trade, Aid, Influence*. Washington D.C.: Brooking Institution Press.
- Looy, J. v. (2006). *Africa and China: A Strategic Partnership?* . Leiden: African Studies Centre.
- Madavo, C. E. (2007). *China and Africa: Opportunities, Challenges and Forging a Way Forward*". Diakses pada 6 April 2017, dari <https://www.bpastudies.org/bpastudies/article/view/42/105>.
- Masuda, M. (2016). *East Asia Forum*. Diakses dari East Asia Forum.org: <http://www.eastasiaforum.org/2016/02/20/why-has-chinese-foreign-policy-become-more-assertive/>
- Meidan, M. (2016). *The Structure of China's Oil Industry: Past Trends and Future Prospects*. Oxford: The Oxford Institute for Energy Studies.
- MOFCOM. (2014). *Ministry of Commerce Holds Briefing on Measures for Administrations of Foreign Aid*. Diakses pada 27 April 2017, dari <http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/press/201412/20141200851923.shtml>.
- Nam, P.-L. (2005). *Energy in China: Development and Prospects*. Diakses Februari 15, 2017, dari China perspectives: <https://chinaperspectives.revues.org/2783>
- Olander, dkk. (2015). *Will China's Slowing Economy Derail its Africa Strategy?* Diakses Februari 28, 2017, dari Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2015/12/02/china-africa-xi-jinping-economy-forum-zimbabwe-investment/>.

- PwC. (2015). *Dari Fragile to Agile: Africa Oil and Gas Review*. South Africa: Pricewaterhouse Coopers.
- PwC. (2016). *The Choice to Change Africa Oil and Gas Review*, . South Africa: Pricewaterhouse Coopers.
- Quigley, S. (2014). *Chinese Oil Acquisitions in Nigeria and Angola*. Diakses pada 31 Maret 2017, dari The American University of Cairo: <http://schools.aucegypt.edu/huss/pols/khamasin/Pages/article.aspx?eid=14>.
- Robertson, W., & Benabdallah, L. (2016). *China Pledged to Invest \$60 Billion in Africa: Here's What That Means*. Diakses pada 27 April 2017, dari Washington Post.: <https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/01/07/china-pledged-to-invest-60-billion-in-africa-heres-what-that->
- Roser, H. R. (2015). *Our World in Data*. Diakses dari Ourworldindata.org: <https://ourworldindata.org/energy>
- Sell, C. (2016). *China Overtook U.S. as Biggest Oil Importer in September: Chart*. Diakses pada 6 April 2017, dari Blommborg: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-13/china-overtook-u-s-as-biggest-oil-importer-in-september-chart>
- Shijia, L. (2007). *Harmonious World: China's Ancient Philosophy for New International Order*. Diakses dari China Embassy.
- Sinaga, F. C. (2017). Kepentingan Tiongkok terhadap Afrika Melalui Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC). hal. 1-9.
- Smil, V. (1978). *China's Energy Prospects: A Tentative Appraisal*. . Pacific Affairs: University of British Columbia.
- Sun, Y. (2014). *Africa in China's Foreign Policy*. . Washington, D.C.: Henry L. Stimson Center.
- Swaine, M. D. (2015). *Xi Jinping on Chinese Foreign Relations: The Governance of China and Chinese Comentary*. . California: China Leadership Monitor Hoover Perspectives Institution.
- Taylor, I. (2012). *China's Rise in Africa: on a Developing Connection*. . Abingdon: Routledge.
- Tembe, P. (2015). *The Temptations and Promotion of "China Dream": Calling for Africa's Home-Grown Rhetoric*. South Africa: Stellenbosch.
- Vanguard. (2016). *China Seeks more Crude Oil Export dari Nigeria*. Diakses pada 5 April 2017, dari <http://www.vanguardngr.com/2016/03/china-seeks-more-crude-oil-export-dari-nigeria-3/>.
- Wenping, H. (2007). The Balancing Act of China's Africa Policy. In B. G. Blair., *China Security: China's Rise in Africa*. . Washington, D.C.: World Security Institute.
- Wijayanti, P. P. (2017). *Kebutuhan Sumber Daya Energi Sebagai Ancaman Perkembangan*. Diakses dari Distrodoc.com: <http://www.distrodoc.com/5561-kebutuhan-sumber-daya-energisebagai-ancaman-perkembangan-ekonomi-china>.
- WITS. (2017). *Sub-Saharan Africa Trade at a Glance: Most Recent Values*. Diakses April 3, 2017, dari <http://wits.worldbank.org/countrysnapshot/en/SSF>
- Wolfe, e. L. (1967). *Political Implication of the Petreoleum Industry in China*. . California: University of California Press.
- WorldTradeOrganization. (2019). *World Trade Organization*. Diakses dari World Trade Organization.
- Xiliang, H. J. (2005). Analysis of Declining Tendency in China's Energy Consumption Intensity During the Period of 11th Five-year Plan. Dalam *China Soft Science* 4 (pp. 33-38).

- Xinhuanet. (2018). *Spotlight: FOCAC Beijing summit shows China's approach, dedication to Africa*. Diakses dari Xinhuanet.com: http://www.xinhuanet.com/english/2018-09/06/c_137449669.htm
- Xuejun, T. (2016). *Ambitious Goals and Bright Prospects: a New Era for China-Africa Relations*. . South Africa: The Thinker.
- Zhao, J. (2001). *Reform of China's Energy Institutions and Policies: Historical Evolution and Current Challenges*. . Cambridge: Belfer Center for Science and International Affairs.
- Zheng, Y. (2016). *China's Aid and Investment in Africa: A Viable Solution to International Development?*. . Shanghai: Fudan University.